

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENGGUNAAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN PETERONGAN**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD MIFTAH AINURROHMAN

NIM: G92218063



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ahmad Miftah Ainurrohman

NIM : G92218063

Jurusan/Semester : Akuntansi/Delapan

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan Peterongan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

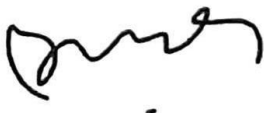


Ahmad Miftah Ainurrohman
G92218063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Miftah Ainurrohman NIM G92218063 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 15 Juli 2022
Pembimbing



Dr. Imam Buchori, Se., M.Si
NIP: 196809262000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Miftah Ainurrohman NIM. G92218063 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 20 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi:

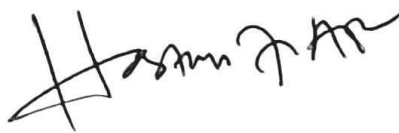
Penguji I



Dr. Imam Buchori, SE., M.Si

NIP. 196809262000031001

Penguji II



Hastanti Agustin Rahayu, SE, M.Acc, Ak, CA, BKP

NIP. 198308082018012001

Penguji III



Ade Irma Suryani Lafing, M.S.A

NIP. 199110012019032020

Penguji IV



Ashari Lintang Yudhanti, S.E., M.Ak

NIP. 199411082019032021

Surabaya, 20 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Strajati Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Miftah Ainurrohman
NIM : G92218063
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
E-mail address : miftaahmad890@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Penggunaan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan Peterongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2022

Penulis

(Ahmad Miftah Ainurrohman)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di kecamatan peterongan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kecamatan Peterongan sebanyak 14 desa dan sampel yang digunakan sebanyak 10 desa dengan 73 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuesioner. Teknik pemilihan sampel menggunakan *stratified random sampling* dengan kriteria berdasarkan pembagian dana desa terbesar dan dana desa terkecil. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan metode regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji t, dan uji F dengan bantuan software SPSS versi 26.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah desa untuk membenahi perangkat teknologi yang tersedia sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, akurasi perhitungan, dan laporan dan hasil lainnya dalam pengelolaan keuangan agar lebih tepat waktu, serta untuk pengendalian internal pada indikator kegiatan pengendalian untuk aset yang dimiliki seharusnya sudah diberikan penomoran yang sesuai.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Alam, Penggunaan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	15
2.2.1 Akuntansi Sektor Publik	15
2.2.2 Teori Stewardship	18
2.2.3 Standar Akuntansi Pemerintah	20
2.2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia	21
2.2.5 Penggunaan Teknologi Informasi	23
2.2.6 Sistem Pengendalian Internal	24
2.2.7 Kualitas Laporan Keuangan	27

2.3 Pengembangan Hipotesis	31
2.4 Kerangka Konseptual.....	38
BAB 3	39
METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Pendekatan Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran	39
3.4 Populasi dan Sampel.....	43
3.5 Jenis dan Sumber data.....	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7 Teknik Analisis	45
3.8 Kriteria Pengujian Hipotesis	46
BAB 4	50
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian	50
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Karakteristik Responden.....	51
4.2.2 Uji Kualitas Data	54
4.2.3 Statistik Deskriptif	57
4.2.4 Uji Regresi Linear Berganda	58
4.2.5 Uji Asumsi Klasik.....	61
4.2.6 Uji Hipotesis	64
4.3 Pembahasan	67
4.3.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	67

4.3.2	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.....	69
4.3.3	Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.....	71
4.3.4	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.....	73
4.3.5	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	76
BAB 5		77
PENUTUP		77
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		84

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian	51
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia	52
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir	53
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden berdasarkan Lama Menjabat	53
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	54
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	54
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Penggunaan Teknologi Informasi	55
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal	55
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	55
Tabel 4. 11 Hasil Uji Reliabilitas	56
Tabel 4. 12 Statistik Deskriptif	57
Tabel 4. 13 Uji Regresi Linear Berganda.....	59
Tabel 4. 14 Uji Normalitas.....	61
Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
Tabel 4. 16 Uji T	64
Tabel 4. 17 Uji F	66
Tabel 4. 18 Uji Koefisien Determinasi	67

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	38
Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas.....	63



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, segala bentuk kepentingan dan keperluan masyarakat desa dapat lebih diperhatikan. Pemerintah desa yang merupakan subyek pembangunan mendapatkan peluang yang lebih besar dari pemerintah pusat untuk mengelola pemerintahannya dengan beragam sumber daya yang dimilikinya, termasuk mengelola keuangan dan aset desa sehingga diharapkan dapat terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan pembangunan. Lebih lanjut, sumber dana yang diterima untuk dikelola pemerintah desa terbagi menjadi 2, yaitu Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari 10% alokasi APBD kabupaten. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mengalokasikan dana desa dengan rata-rata berjumlah Rp. 1,5 Miliar ke seluruh desa di Indonesia. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab yang besar dan merupakan peran penting yang diemban oleh pemerintah desa dalam pengelolaannya, semakin besar dana yang diterima sejalan dengan semakin tingginya resiko yang dihadapi khususnya aparat desa dalam pengelola dana desa. Oleh karena itu, asas tanggung jawab menjadi hal utama yang harus diterapkan oleh pemerintahan desa dalam pengelolaannya, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan perangkat desa harus dipertanggungjawabkan diakhir periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Gagali and Kuntadi 2019).

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting sebagai bentuk pertanggungjawaban (*accountability*) kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada instansi tersebut oleh pemerintah. Hasil dari kinerja pemerintah desa dapat tercermin dari laporan keuangan desa, terlepas dari apakah kinerja pemerintah berfungsi dengan baik sehingga aparat desa dapat memberikan informasi keuangan yang baik (Juhirman n.d.). Sektor pemerintahan meliputi semua unit kelembagaan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, termasuk desa, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang desa wajib untuk memberikan informasi berupa laporan keuangan dan informasi lain sebagai bentuk pertanggungjawaban. Penyelenggaraan pertanggungjawaban dalam pemerintahan diatur dengan berbagai peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan jelas menyatakan asas keadilan, keteraturan, dan kesejahteraan bersama harus diterapkan agar pengelolaan keuangan tertib, ekonomis, efisien, dan sesuai dengan undang-undang serta regulasi yang berlaku secara efektif dan transparan (Pradono and Basukianto 2015).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, data informasi keuangan pemerintah sering digunakan untuk menentukan nilai belanja modal yang digunakan, melakukan aktivitas pemerintahan, menganalisis kinerja keuangan, mengukur efisiensi dan efektivitas perekonomian, dan untuk menentukan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selain itu, pelaporan keuangan pemerintah juga merupakan

bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik atas pengelolaan dana masyarakat, baik pajak, retribusi maupun transaksi lainnya. Laporan keuangan pemerintah setidaknya mengandung banyak komponen yang diperlukan sebagai sarana pertanggungjawaban.

Kualitas pelaporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitas pelaporan keuangan sesuai peraturan pemerintah tahun 2010 No. 71, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang memenuhi persyaratan peraturan, seperti yang ditentukan dalam kerangka akuntansi pemerintah, dapat dibandingkan, dapat dipahami, andal, dan relevan. Ini berarti bahwa pemerintah dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka dengan lebih baik jika informasi dalam pedoman keuangan memenuhi standar tersebut (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010).

Kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Pandangan ini bermula dari fakta bahwa BPK menemukan kejanggaran dalam pemeriksaan laporan keuangan negara. Data perbendaharaan juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi beberapa masalah dalam mengelola keuangan desa/daerah, terutama terkait dengan integritas, keahlian dan transparansi (Chantiqa n.d.).

Fenomena yang saat ini muncul dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah meningkatnya desakan dari lembaga publik baik pusat maupun daerah serta masyarakat terhadap kualitas data informasi keuangan pemerintah. Laporan keuangan desa dianggap baik jika memenuhi prinsip tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah

No. 71 tahun 2010 (Kiranayanti and Erawati 2016). Laporan keuangan tersebut penting dan harus memenuhi persyaratan kualitatif karena berfungsi sebagai landasan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selain itu, berita keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (M, Forijati, and Muchson 2021)

Banyak aspek yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada saat penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas sangat penting sebab data keuangan merupakan sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi digunakan oleh pemakai untuk mengambil keputusan, sehingga kualitas laporan keuangan tentunya mempengaruhi kualitas keputusan yang dibuat. Dalam penelitian sebelumnya, aspek-aspek yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai kualitas laporan keuangan, namun masih terdapat perbedaan antar penelitian tersebut. Penelitian juga lebih banyak dilakukan pada pemerintah daerah, namun masih jarang di pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dkk (2020) menggunakan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Dina dkk (2021) menggunakan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, penggunaan teknologi informasi, dan

sistem penggunaan intern. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa variabel penerapan standar penggunaan pemerintah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel teknologi informasi berdampak negatif. Penelitian oleh Shohabatussa'adah dan Nasrullah (2021) memakai variabel kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan, sedangkan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang berpedoman pada prinsip ketepatan waktu dan disusun dengan menggunakan prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Ini meningkatkan kualitas laporan keuangan (Surya Prayogo and Setiany 2020). Untuk dapat memperoleh laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, keberadaan Standar Akuntansi Pemerintah tentunya memiliki landasan hukum tersendiri berupa landasan yang bertujuan untuk tingkatan kualitas laporan keuangan seluruh instansi pemerintah (Hartanti, Askandar, and Sudaryanti 2021).

Kompetensi sumber daya manusia juga mempunyai fungsi penting dalam penyusunan laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang

akuntansi, karena laporan keuangan ialah wujud dari produk akuntansi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan keuangan harus didukung oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang mumpuni agar dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas (Abdul dan Wina, 2021). Aparat desa yang berkualitas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Perangkat desa yang berkualitas akan meningkatkan nilai informasi keuangan yang disajikan (Agus dan Diah, 2021).

Penggunaan teknologi informasi juga diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan organisasi. Teknologi informasi mempercepat pengelolaan data transaksi dan menghindari kesalahan saat memasukkan banyak file, seperti data keuangan dalam jurnal (Melinda and Ayu 2021). Salah satu aplikasi teknologi informasi ini adalah dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan bersama oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penggunaan Siskeudes mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan menggunakan teknologi informasi seperti ini, akan sangat membantu proses akuntansi dan pelaporan dengan mempercepat pemrosesan data transaksi serta memungkinkan kesalahan dapat dihindari dan diminimalkan. Dengan menggunakan teknologi informasi diharapkan, proses penyusunan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan kesalahan yang lebih sedikit, guna untuk dapat meningkatkan ketepatan waktu dan keandalan pelaporan keuangan. Laporan

keuangan yang disampaikan tepat waktu meningkatkan kegunaan laporan keuangan. Selain ketepatan waktu dan handal, komparabilitas pelaporan keuangan antar desa juga meningkat. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi SisKeuDes seharusnya dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Aplikasi SisKeuDes diharapkan dapat meningkatkan keakuratan dan keandalan informasi serta memberikan informasi pelaporan keuangan yang lebih tepat waktu. Oleh karena itu, semakin baik penggunaan teknologi, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Riyanita and Widiastuti 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas dalam informasi keuangan adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah seperangkat dari struktur organisasi, prosedur, dan langkah-langkah standar yang ditetapkan guna menghasilkan laporan yang akurat, andal, dan bertanggung jawab, serta upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap semua pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Hartanti, Askandar, and Sudaryanti 2021). Unsur-unsur yang terdapat dalam pengendalian internal dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengendalian internal (Adah and Nasrullah 2021). Kualitas informasi keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh keandalan pemakaian sistem akuntansi. Sistem akuntansi erat kaitannya dengan sistem pengendalian internal suatu organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah yang mempunyai pengendalian internal yang baik. Sistem akuntansi yang dicakupnya mengelola sistem pengendalian intern (SPI) serta kualitas pelaporan keuangan sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya SPI pemerintah, karena ada sistem yang dapat mengendalikan semua kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa agar sesuai dengan tujuan pembangunan desa tanpa melanggar aturan apapun (Tanjung and Sonia 2021).

Salah satu indikator penting berkualitasnya laporan keuangan ialah ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan tersebut. Penelitian dilakukan mengingat pada pemerintah desa di Kecamatan Peterongan masih sering terlambat dalam menyampaikan laporan. Obyek dalam penelitian ini adalah Kecamatan Peterongan dengan jumlah desa sebanyak 14 desa yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang dan harus menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang ada. Data yang didapatkan dalam pemerintah desa di Kecamatan Peterongan juga masih terdapat penyusunan laporan keuangan yang belum tertata dengan rapi, hal ini dapat dilihat masih cukup banyak perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh inspektorat dan satuan tugas dari kecamatan serta masih adanya kelemahan penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang saat ini dan perbedaan objek penelitian terdahulu maka penulis memiliki maksud dan tujuan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan Peterongan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Peterongan?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Peterongan?
3. Apakah Penggunaan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Peterongan?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Peterongan?
5. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Peterongan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Peterongan.
2. Mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Peterongan.
3. Mengetahui Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Peterongan.
4. Mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Peterongan.
5. Mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi

Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Peterongan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan dan informasi bagi peneliti selanjutnya dan kemajuan ilmu akuntansi di sektor publik, terutama untuk memahami hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan penggunaan informasi dan sistem pengendalian internal serta kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

1.4.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi kapabilitas sumber daya manusia saat ini dengan penggunaan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya guna mendukung hasil riset yang telah dilakukan serta sebagai pembandingan dengan riset sebelumnya.

Hasil riset yang relevan tercantum di bawah ini, termasuk:

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No .	Nama dan Tahun	Pengukuran Variabel		Populasi dan Sampel	Teknik Analisis Data	Hasil yang diperoleh
		X	Y			
1.	Ruslina Lisda, Liza Laila N, dan Lisna Septianisa. 2018	Implementasi simda desa, Sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sdm	Kualitas laporan keuangan	Populasi sebanyak 165 Desa di Kabupaten Bandung Barat, dengan sampel sebanyak 41 desa/kelurahan	Menggunakan analisis regresi linier berganda	secara parsial sekaligus simultan variabel sistem informasi desa (SIMDA), pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

2.	Abdul Hafiz Tanjung dan Wina Sonia. 2021	Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas laporan keuangan	Populasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektur Kota Cimahi memiliki 71 pegawai. Untuk sampel 60 orang.	Analisis menggunakan metode SEM yaitu Partial Least Squares SEM (PLS-SEM). Alat analisis yang digunakan adalah SmartPLS 3.	secara parsial sekaligus simultan variabel sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
3.	Ahmad Faishol. 2016	Sistem pengendalian intern	Kualitas laporan keuangan	Sampel penelitian ini adalah pegawai pada 15 SKPD bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 71 responden	metode analisis data menggunakan analisis regresi linear dan proses pengolahan data menggunakan program komputer SPSS (Statistical Package For Social) versi 21	secara terpisah (uji t) maupun secara simultan (uji f) sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan
4.	Ansir Launtu. 2021	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi	Kualitas laporan keuangan	Populasinya adalah SKPD	Uji validitas dan reliabilitas, juga telah	variabel independent yaitu penerapan sistem

		Pemerintah dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Kabupaten Gowa dengan jumlah 52 SKPD, dan sampel yang diambil adalah 25 SKPD berupa dinas, dengan jumlah 72 responden.	diuji asumsi klasik berupa asumsi normalitas dan multikolinearitas. Metode analisis data menggunakan teknik regresi berganda.	akuntansi pemerintah daerah dan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah secara parsial maupun simultan
5.	Zaizar Wiet Rifandi. 2019	Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi	Kualitas laporan keuangan	Populasi dalam riset ini adalah pemerintah desa di 12 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Sampel untuk penelitian ini 66 responden yang merupakan perangkat pemerintahan desa di seluruh desa yang ada di	Data dianalisis dengan metode uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis	variabel implementasi siskeudes aplikasi, kompetensi sumber daya manusia, dan transparansi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa

				kabupaten Wates.		
6.	Yuliana Sueng, Sulaiman dan Suryaning si. 2020	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi	Kualitas laporan keuangan	Populasi dalam penelitian ini adalah 10 desa di Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai . Besar sampel untuk riset ini adalah 30 responden	Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda	penerapan SAP dan Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa baik secara parsial maupun simultan
7.	Imam Surya Prayogo dan Erna Setiany. 2020	Transparansi Pemerintahan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern	Kualitas laporan keuangan	Populasi riset ini adalah seluruh desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung. Jumlah responden adalah 73 aparat desa.	metode analisis dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM) dengan bantuan Software Partial Least Square (PLS) yaitu SmartPLS	variabel Penerapan SAP dan pengendalian internal berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
8.	Annie Mustika P, Linda Hetri S, dan Intan Diane B. 2018	Penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia	Kualitas laporan keuangan	Populasi yaitu 3 kabupaten/ Kota dengan APBD terbesar. Sampel pejabat penatausah	analisis regresi linier SPSS v.17	penerapan SAP dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan

				aan keuangan di satuan kerja perangkat		keuangan pemerintah daerah
9.	Nabila Zubaidi, Dwi Cahyono, Astrid Maharani. 2019	Kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi	Kualitas laporan keuangan	Sampel riset ini berjumlah 99 pegawai/karyawan dan pegawai pengguna teknologi informasi tiga bank syariah Situbondo.	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda	kompetensi Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan
10.	R.E. Mene, Herman Karamoy Dan Jessy D.L.Warongnan. 2018	Pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan Sistem pengendalian intern	Kualitas laporan keuangan	Sampel survei ini terdiri dari 60 sampel, dan kriteria responden adalah kepala subbagian keuangan dan petugas perbendaharaan.	Analisis data menggunakan metode statistik analisis regresi berganda”	variabel dependen dalam penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasikan, menyajikan laporan, dan menafsirkan hasil untuk

transaksi dan peristiwa keuangan (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 2010). Akuntansi pemerintah adalah teknik akuntansi dan mekanisme analisis yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga negara dan departemen yang bergantung padanya. Akuntansi pemerintah sering dianggap sebagai istilah lama dan sudah diubah dengan menjadi bahasa akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah sistem atau prosedur akuntansi yang digunakan oleh lembaga pemerintahan sebagai sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat. Praktik akuntansi entitas publik, baik di sektor publik maupun di entitas publik non-pemerintahan, kini semakin mendapat perhatian. Lembaga publik menyambut baik permintaan masyarakat agar dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab (Renyowijoyo 2010).

Akuntansi sektor publik berhubungan dengan tiga aspek, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas.

1. Akuntansi sektor publik adalah cara memberikan pemerintah atau masyarakat umum akses ke data. Dalam proses pengendalian manajemen bagi pemerintah, data akuntansi digunakan mulai dari perencanaan strategis, penyusunan program, penganggaran, penilaian kinerja, dan pelaporan kinerja.
2. Pada sesi akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan zona publik berbentuk laporan surplus/ devisa pada pemerintahan. Data akuntansi selaku perlengkapan pengendalian manajemen berguna sebagai pengambilan keputusan, guna

melaksanakan alokasi sumber daya serta pula dipakai untuk memastikan gejala kinerja sebagai penentu evaluasi kinerja.

3. Akuntansi diperlukan untuk pelaporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) manajemen. Akuntabilitas publik harus dipahami dan diterapkan tidak hanya sebagai akuntabilitas keuangan saja, tetapi juga sebagai akuntabilitas nilai uang, akuntabilitas administrasi, akuntabilitas hukum dan akuntabilitas politik. (Renyowijoyo 2013).

Menurut Mardiasmo (2018) tujuan akuntansi pada sektor publik antara lain:

1. Membagikan data yang dibutuhkan guna mengelola secara benar, efektif serta hemat atas alokasi suatu sumber daya yang diamanahkan kepada organisasi. Ini juga bertujuan dengan pengendalian internal manajemen.
2. Menyediakan data yang memungkinkan para manajer untuk melaporkan penggunaan tanggung jawab program secara tepat dan efisien dan penggunaan sumber daya di bawah kendali mereka, serta data yang memungkinkan pejabat publik untuk melaporkan hasil operasi pemerintah dan penggunaan uang pembayar pajak. Tujuan ini berkaitan dengan akuntabilitas.
3. Memberikan data yang membolehkan untuk manajer guna mengungkapkan tanggung jawab secara sesuai dan efisien suatu program serta pemakaian sumber daya yang merupakan wewenangnya serta membolehkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada masyarakat

atas hasil pelaksanaan pemerintahan serta pemakaian dana publik. Ini bertujuan dengan akuntabilitas.

Akuntansi publik erat kaitannya dengan penerapan dan perlakuan akuntansi di sektor publik. Secara kelembagaan, sektor publik mencakup organisasi nirlaba pemerintah dan organisasi nirlaba non-pemerintah. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah (pusat, daerah, satuan kerja pemerintah), dan non-pemerintah meliputi lembaga swadaya masyarakat, rumah sakit, perguruan tinggi, dan non-pemerintah lainnya (yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik), dll (Renyowijoyo 2010).

2.2.2 Teori Stewardship

Stewardship Theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa segala tindakan manajemen diutamakan untuk kepentingan organisasi dalam merealisasikan visi dan misinya dan bukan diorientasikan untuk kepentingan individu manajemen (Jatmiko et al. 2019).

Teori *Stewardship* didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia. Dengan kata lain, manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, bertindak dengan penuh tanggung jawab, integritas dan jujur kepada orang lain. Ketika memilih antara perilaku mementingkan diri sendiri atau perilaku pro-organisasi, *steward* akan mengubah perilaku melayani diri sendiri menjadi perilaku kooperatif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, pemerintah desa akan lebih berperan sebagai penyelenggara dan pembangun untuk kepentingan masyarakat. Aparat desa memiliki keinginan dan tujuan

pribadi, tetapi keputusan untuk mengutamakan kepentingan pribadi dianggap berbahaya, sehingga bekerja sama adalah pilihan yang paling masuk akal. Kegunaan aparat desa meningkat ketika tindakan mereka ramah organisasi dan dapat menyenangkan masyarakat di mana mereka berpartisipasi.

Pemerintah desa benar-benar ingin mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, maka salah satu caranya adalah melalui laporan keuangan pemerintah yang baik. Aparatur desa bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan atau transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat sehingga laporan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan pihak yang menggunakannya. Laporan keuangan harus dapat dipahami, relevan dengan pengambilan keputusan, andal, dan dapat dibandingkan.

Stewardship theory dipandang lebih tepat apabila diterapkan di organisasi pemerintahan desa. Berbeda dengan korporasi, hubungan antara perangkat desa (*steward*) dengan masyarakat (*principal*) sangat erat. Pada umumnya *principals* (masyarakat) secara tidak langsung adalah pemilik dari organisasi sektor publik, namun *principals* mengalami kesulitan apabila harus mengelola sendiri organisasi sektor publik sehingga terjadilah penyerahan kepercayaan kepada pihak lain (*steward*) untuk pengelolaan yang lebih siap dan mampu. Hal ini membuat pemisahan fungsi antara kepemilikan dan manajemen menjadi sangat jelas (Riyanita and Widiastuti 2020).

Dengan diterapkannya standar akuntansi sesuai peraturan pemerintah, ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi yang baik, penggunaan teknologi informasi yang semaksimal mungkin dan pengendalian internal yang baik merupakan hal penting yang membantu *stewardship* dalam memenuhi amanah yang diembannya. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya pemerintah desa untuk menciptakan laporan keuangan yang baik dengan menggunakan teori *stewardship*.

2.2.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasikan, meringkas, menyajikan laporan, dan menafsirkan hasil untuk transaksi dan peristiwa keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaporan terkait transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntan publik.

Standar akuntansi pemerintahan berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintah. Hal ini karena desa bertanggung jawab untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati/walikota sesuai amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Selanjutnya, desa juga

memperoleh pendapatan yang diantaranya bersumber dari APBN dan APBD. Hal ini yang menjadikan hubungan erat antara aktivitas desa dengan aktivitas pemerintahan. Mengingat desa memiliki karakteristik yang khas maka dimungkinkan adanya suatu sistem akuntansi yang berbeda dengan sistem akuntansi pemerintah pusat atau daerah.

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi dasar pengembangan sistem akuntansi desa. Metode akuntansi yang dipilih oleh peraturan tersebut relatif sederhana. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas, yaitu basis akuntansi untuk mencatat transaksi dan peristiwa lain pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Namun, pada akhir tahun anggaran, perangkat desa wajib memberikan informasi tentang aset dan kewajiban non-tunai. Pembukuan desa dilakukan dengan metode tunggal (Sunarti et al. 2018) .

2.2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam suatu organisasi khususnya dalam organisasi pemerintah tentu tidak lepas dari unsur sumber daya manusia yang berperan sebagai motivasi dalam organisasi yang kaitannya dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain ketersediaan peralatan dan infrastruktur. Faktor utama suatu organisasi adalah pada sumber daya manusianya. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang baik untuk mencapai tujuannya.

Sumber daya manusia adalah kepiawaian yang diciptakan dengan menggabungkan kekuatan mental dan kekuatan fisik seseorang. Cara dan

kepribadian ditentukan oleh keturunan dan lingkungan, sedangkan kinerja di tempat kerja didorong oleh keinginan untuk puas dengan diri sendiri (Marnis and Priyono 2008). Sumber daya manusia merupakan potensi manusia sebagai penggerak organisasi. Manusia menjadi salah satu andalan atau pilar pendukung terpenting organisasi dalam mencapai tujuan, serta visi dan misinya (Pangestu, Wafirotin, and Hartono 2019).

Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh kualitas pekerjaan yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Kecerdasan adalah kualitas seseorang yang memiliki kecerdasan, pengetahuan dan kemampuan (Tampubolon and Basid 2019).

Kompetensi manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk bertanggung jawab melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang sesuai. (Melinda and Ayu 2021). Menurut Taliziduhu (2005) dalam (Pangestu, Wafirotin, and Hartono 2019) SDM yang bermanfaat tidak hanya menggunakan bahan mentah seperti bahan mentah, tanah dan air, tetapi juga menciptakan produk baru yang kompetitif, menguntungkan, dan inovatif dengan keunggulan yang sebanding dengan kekuatan terbaik seperti kecerdasan, kreativitas, dan imajinasi serta energi, otot, dll.

Menurut (Putri, Suriyanti, and Binangkit 2018) sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang baik disamping dapat mempengaruhi kualitas instansi pemerintahan desa tersebut secara langsung juga berimplikasi pula pada peningkatan kualitas laporan. Penguatan sumber daya manusia memegang

peranan yang signifikan dalam penyusunan laporan tahunan pemerintah dengan menyediakan laporan yang berkualitas dan tepat waktu.

Pemerintah harus berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Melalui berbagai program yang memungkinkan orang untuk melakukan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan misi masa depan. Ketidakmampuan keterampilan SDM untuk memahami dan menerapkan keterampilan akuntansi dapat mempengaruhi laporan keuangan, seperti kesalahan dalam standar pemerintah, dan dengan demikian kualitas yang buruk. Hal ini membuktikan bahwa bertambah baik sumber daya manusia, maka bertambah tinggi pula kualitas informasi keuangan pemerintah (Rifandi 2019).

2.2.5 Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi adalah suatu pola yang melakukan sesuatu dengan alat dan pikiran (*hardware dan software*) untuk memenuhi kebutuhan manusia, seolah-olah memperbesar, memperkuat atau memperkuat anggota badan, panca indera dan otak manusia. Sementara informasi adalah hasil dari proses mengedit, mengatur, atau mengurutkan database yang bernilai bagi pengguna (Mene, Karamoy, and Warongan 2018).

Teknologi informasi adalah seperangkat praktik yang ada dimana kegiatan ini melibatkan pengumpulan data dan kemudian mengolahnya menjadi informasi yang kemudian didistribusikan kepada pihak atau pengguna yang membutuhkan (Hartanti, Askandar, and Sudaryanti 2021).

Tanggung jawab penggunaan teknologi ditetapkan dalam kebijakan Peraturan pemerintah No 65 Tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah. Penggunaan teknologi informasi juga dapat membantu dalam mempercepat data bisnis dan memberikan informasi keuangan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa informasi keuangan tidak hilang pada nilai tekstualnya sendiri, misalnya periode. Penjelasan PP 65 Kebijakan Keuangan 2010 menyebutkan bahwa untuk melanjutkan pembangunan, pemerintah harus membangun tata pemerintahan yang baik. Kemajuan teknologi informasi dan penggunaan teknologi informasi bermanfaat untuk peningkatan manajemen keuangan dan penyebaran informasi keuangan pada pelayanan publik (Pravasanti and Ningsih 2019).

2.2.6 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu metode, proses dan kebijakan yang dikembangkan oleh direksi, manajemen dan karyawan lainnya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional yang memadai, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ayu and Kusumawati 2020). Pengendalian internal adalah dasar untuk manajemen, kontrol dan pengukuran sumber daya manusia dalam organisasi dan memainkan peran penting dalam pencegahan dan deteksi penipuan. Sistem tersebut mencakup kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan dan memastikan bahwa ketersediaan informasi keuangan yang andal juga memastikan kepatuhan terhadap sanksi dan peraturan yang berlaku. (Melinda and Ayu 2021). Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan

alat yang digunakan untuk mengelola, memantau, dan mengukur sumber daya organisasi serta berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan(Kiranayanti and Erawati 2016).

Dalam (Peraturan Pemerintah No. 60 2008) pengendalian internal adalah proses mengintegrasikan kerja berkelanjutan dari manajemen dan semua karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui operasi yang efisien dan efektif, media yang relevan, andal, perlindungan sumber daya pemerintah, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Pengendalian intern adalah keseluruhan proses pemeriksaan, penelaahan, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan terhadap pemenuhan tugas dan kewajiban organisasi dalam rangka memastikan bahwa kegiatan telah dikerjakan secara efektif dan efisien dengan standar yang ditetapkan untuk keperluan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memiliki beberapa elemen sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan bagian penting dari SPIP karena mencerminkan keseimbangan antara manajemen mutu, sumber daya manusia dan tindakan yang menciptakan lingkungan / gaya organisasi yang baik.

b. Penilaian Risiko

Elemen kedua dari pengendalian internal adalah penilaian risiko. Penilaian risiko dimulai dengan pengembangan tujuan dan sasaran yang jelas dan konsisten dari kantor-kantor publik di lembaga dan kegiatan. Selain itu, pelayanan pemerintah secara efektif dan efisien mengidentifikasi risiko yang menghambat tujuan tersebut, baik di dalam maupun di luar. Risiko yang diketahui diperiksa untuk menentukan dampaknya terhadap pencapaian tujuan. Pejabat pemerintah mengembangkan strategi manajemen risiko dan tindakan pencegahan risiko yang diperlukan untuk meminimalkan risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Elemen ketiga dari sistem pengendalian internal adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian internal merupakan pedoman beserta tata cara yang memastikan bahwa pedoman pemerintah diterapkan untuk meminimalkan risiko yang teridentifikasi selama proses penilaian risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Elemen keempat dari pengendalian internal adalah informasi dan komunikasi. Instansi pemerintah wajib memuat data yang bisa dipercaya tentang peristiwa internal dan eksternal dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik keuangan maupun non-keuangan. Informasi ini dicatat secara tepat waktu oleh instansi pemerintah dan pihak lain kepada instansi pemerintah yang memintanya dan dikomunikasikan

kepada manajemen sehingga pengendalian internal dan tanggung jawab operasional dapat ditegakkan.

e. Pemantauan

Pemantauan adalah elemen kelima atau terakhir dari pengendalian internal. Pengendalian internal dipantau melalui audit rutin, penilaian terpisah dan kepatuhan terhadap hasil audit dan rekomendasi penilaian lainnya. Pengawasan secara berkala dilakukan melalui pengelolaan sehari-hari, pengawasan, perbandingan, kolaborasi dan praktek-praktek lain yang berkaitan dengan kinerja pekerjaan.

2.2.7 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah data atau informasi mengenai keuangan suatu perusahaan pada saat diterbitkan yang bisa dipergunakan untuk menguraikan operasi perusahaan, informasi yang mempengaruhi kinerja keuangannya dan asetnya, melaksanakan operasi pemerintah, mengevaluasi situasi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dan memantau kepatuhan terhadap peraturan (Hartanti, Askandar, and Sudaryanti 2021).

Menurut (Pangestu, Wafirotin, and Hartono 2019) Laporan keuangan tahunan memiliki berbagai tujuan, khususnya untuk memberikan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran keuangan, pemerintah menggunakan sumber daya yang tersedia, memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah akan menanggapi kebutuhannya, memberikan informasi yang konkret dan faktual tentang situasi keuangan pemerintah, memberikan pemahaman tentang perubahan posisi keuangan entitas.

(Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010) menjelaskan bahwa ada kurang lebih 4 kelompok yang menggunakan laporan keuangan pemerintah, yaitu: publik, Lembaga pengawas dan pemeriksa laporan keuangan, individu/organisasi yang memberikan sumbangan/investasi dan yang terakhir adalah pemerintah sendiri.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menerangkan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Setiap laporan keuangan desa yang disampaikan harus bersumber pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta harus dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Laporan keuangan pemerintah desa berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat, komponen yang disajikan sekurang-kurangnya memuat jenis-jenis laporan dan unsur informasi yang dipersyaratkan oleh undang-undang sehingga dimungkinkan untuk mencapai pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta memperkuat komunitas desa. Elemen dalam laporan keuangan desa meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran Desa

Memuat informasi mengenai pelaksanaan anggaran mencakup anggaran dan pelaksanaan untuk periode yang dipantau dan memberikan informasi tentang pengumpulan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sesuai dengan taksiran yang telah disetujui.

b. Laporan Kekayaan Masyarakat Desa/Neraca

Memuat informasi perubahan aset dan kewajiban perangkat desa pada tanggal pelaporan dan perubahan aset pada periode pelaporan.

c. Catatan atas Laporan Keuangan Desa

Ini berisi semua data yang relevan yang ada di neraca dan yang belum dimasukkan dalam catatan penjelasan atas laporan keuangan desa.

Sesuai dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengharuskan kualitas dalam laporan keuangan diperhatikan oleh setiap sektor pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penggunaannya. Kualitas informasi keuangan dapat ditentukan apabila empat kriteria karakteristik kualitatif berikut ini terpenuhi:

a. Relevan (*relevant*)

Laporan keuangan pemerintah dapat dianggap tepat jika laporan yang dihasilkan mampu mempengaruhi pemakai dalam mengambil keputusan dengan menilai kondisi masa lalu, sekarang, meramalkan masa depan, dan mengidentifikasi atau mengoreksi hasil tindakan yang telah berlalu. Informasi dapat dikatakan relevan apabila memenuhi hal-hal berikut

1) Mempunyai manfaat timbal balik

Artinya informasi ini menguatkan pengguna untuk mengetahui maupun memperbaiki kesalahan sebelumnya.

2) Mempunyai manfaat prediktif

Artinya bahwa informasi yang tersedia bisa menunjang pengguna

memprediksi masa depan bersumber pada kejadian yang telah berlalu serta saat ini.

3) Tepat waktu

Ini berarti menyajikan data secara tepat waktu sehingga bisa bermanfaat dalam memutuskan ketetapan.

4) Lengkap

Data yang tersedia disediakan semaksimal mungkin.

b. Andal (*reliable*)

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan bebas dari kecurangan, kesalahan dan semua fakta dapat diungkapkan dan dievaluasi secara jujur. Informasi mungkin terpengaruh, tetapi penggunaan tidak akan valid jika status atau representasinya tidak dapat diandalkan. Data yang andal dapat didasarkan pada:

1) Penyajian secara jujur

Informasi ini secara wajar menggambarkan perubahan dan keadaan lain yang mungkin perlu diungkapkan.

2) Dapat diverifikasi

Informasi yang dikemukakan pada laporan tahunan akurat, dan bahkan setelah beberapa upaya oleh berbagai pihak, hasilnya masih menunjukkan kesimpulan yang meyakinkan.

3) Netralitas

Informasi bukanlah kebutuhan kelompok tertentu, namun berdasarkan kebutuhan publik.

c. Dapat dibandingkan

Ini bermakna data laporan keuangan tahunan bisa lebih menunjang bila dapat dibanding dengan laporan keuangan tahun terdahulu. perbandingan dapat juga dilakukan dengan laporan keuangan dari organisasi/entitas lain.

d. Dapat dipahami (*understandable*)

Pengungkapan dalam laporan keuangan mudah dimengerti oleh pengguna dan disajikan dalam bentuk dan sebutan yang sesuai bagi pengguna untuk jangka waktu tertentu. Untuk alasan ini, diasumsikan bahwa pengguna memiliki pengetahuan dan rasa ingin tahu yang cukup tentang aktivitas dan lingkungan bisnis entitas pelapor.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan dan kerangka teori yang telah diuraikan di atas, sehingga dapat dikembangkan hipotesis penelitian berikut ini:

2.3.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah guna dalam peningkatan kualitas laporan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Secara teoritis, penggunaan akumulasi standar akuntansi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, laporan keuangan

pemerintah yang disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif. Selain itu, dengan informasi yang lebih komprehensif membuat laporan keuangan pemerintah menjadi lebih relevan dan kredibel. Berdasarkan *Stewardship theory*, pemerintah (*steward*) berkewajiban menyajikan informasi bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah desa dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang digunakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsisten. Sehingga informasi yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau entitas lain guna untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa kualitas laporan keuangan dinilai lebih tinggi setelah standar akuntansi pemerintah ini diimplementasikan daripada sebelumnya (Jati 2019).

Senada dengan penelitian penelitian Imam (2020) dan Yuliana, dkk (2020) dan Putri, dkk (2018) juga menemukan hasil yang sama bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan maka dapat dikembangkan hipotesis berikut:

H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

2.3.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Kualitas informasi keuangan dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pencatatan keuangan. Dalam hal ini sumber daya manusia adalah aparatur pemerintah desa, perangkat desa yang kompeten akan memiliki pemahaman tentang pencatatan keuangan yang lebih baik. Artinya, apabila pemerintah ingin laporan keuangan yang berkualitas maka sumber daya manusia dalam pemerintah tersebut harus semakin berkompeten (Tanjung and Sonia 2021). Menurut teori *stewardship*, eksekutif cenderung bertindak demi kepentingan terbaik organisasi, bukan demi kepentingan terbaik mereka sendiri. Sehingga, peran kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan desa sangat penting.

Hasil studi yang dilakukan oleh Lisda, dkk (2018) menyebutkan bahwa selama penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. Hasil serupa juga didapatkan dalam riset yang dari Launtu (2021), Putri, dkk (2018), Rifandi (2019) dan Zubaidi, dkk (2019) yang juga menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Disimpulkan bahwa jika kapasitas manusia pemerintah baik, kualitas pelaporan keuangan akan meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan maka dapat dikembangkan hipotesis berikut:

H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

2.3.3 Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Sistem Akuntansi Informasi di desa disebut SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelola sistem keuangan didesa (Sueng, Sulaiman, and Suryaningsi 2020). Pengelolaan keuangan sampai ke penyampaian informasi keuangan instansi/lembaga pemerintah kepada masyarakat secara umum diwajibkan untuk memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi, hal ini karena dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pemrosesan data transaksi keuangan akan lebih cepat sehingga dalam pelaporan keuangan tidak kehilangan nilai informasi kualitas laporan keuangan yaitu ketepatanwaktuan. Teori *stewardship* menyatakan bahwa manajer (*steward*) tidaklah termotivasi oleh kepentingan individu, akan tetapi lebih mementingkan kepentingan pemilik (*principal*). Praktek dalam organisasi sektor publik, dengan memanfaatkan teknologi informasi ini akan mempermudah *steward* dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan sehingga kualitas dalam laporan keuangan menjadi berkualitas.

Hasil studi yang telah dilakukan oleh Rifandi (2019), Zubaidi, dkk (2019), Yuliana, dkk (2020) dan Mene (2018) menunjukkan bahwa penggunaan

teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan ini dapat dibuktikan bahwa pemakaian teknologi informasi yang sesuai dapat meningkatkan nilai dari laporan keuangan.

Berdasarkan kesimpulan riset terdahulu yang dilakukan maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H3 : Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

2.3.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang dikembangkan dari dalam organisasi itu sendiri oleh direksi, manajemen dan pegawai lainnya sehingga memberikan jaminan tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, berkualitasnya laporan keuangan, dan kesesuaian terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan. Pengendalian internal dapat dikatakan baik apabila dapat memenuhi kebutuhan dan kondisi organisasi sehingga dapat meningkatkan semangat untuk terus berusaha menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Ayu and Kusumawati 2020). Berdasarkan teori *stewardship*, seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas di lembaga publik, semakin sulit bagi prinsipal untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, akuntansi sangat berperan dalam pemisahan tugas antara kepemilikan dan pengelolaan untuk mencapai kepentingan bersama dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan milik negara.

Apabila suatu sistem pengendalian internal tersebut tak terlaksana secara benar maka akan sulit dalam mengidentifikasi kesalahan dalam proses pencatatan keuangan, sehingga bukti audit yang didapatkan mungkin tidak akurat. Artinya semakin meningkat nilai laporan keuangan pemerintah maka bertambah baik pula penerapan pengendalian internal yang dilaksanakan (Kiranayanti and Erawati 2016).

Hasil dari penelitian Lisda, dkk (2018) menyatakan sistem pengendalian internal berdampak pada kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Tanjung dan Sonia (2021), Faisol (2016) dan Mene, dkk (2018) yang juga mendapatkan kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan riset terdahulu yang dilakukan maka dapat dikembangkan hipotesis berikut:

H4 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

2.3.5 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, standar akuntansi pemerintah harus digunakan sesuai peraturan yang berlaku untuk memberikan hasil pengukuran kinerja yang lebih baik dan memungkinkan pengelolaan keuangan/aset yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas dan pemahaman

tentang prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang sesuai dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan yang berkualitas baik. Karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam membuat laporan keuangan yang baik. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh keterampilan orang-orang (SDM) dalam organisasi tersebut.

Sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan sangat didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Meskipun laporan keuangan ialah hasil dari sumber daya manusia dalam akuntansi, namun penggunaan teknologi dapat mengurangi human *error*. Penggunaan teknologi informasi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan dalam memproses data transaksi dan memberikan laporan keuangan kepada pemerintah, harus memenuhi data keuangan dengan nilai informasi yang terkini.

Kualitas pelaporan keuangan suatu pemerintah juga tergantung pada seberapa baik pengendalian internal instansi pemerintah tersebut dijalankan. Pengendalian internal yang kurang baik akan menyulitkan pendeteksian kecurangan/ketidaksesuaian dalam proses akuntansi dan membuat bukti audit dari data akuntansi tidak dapat diterima. Pengendalian internal adalah dasar untuk mengelola, mengendalikan dan mengukur sumber daya manusia dalam suatu organisasi dan memainkan peran penting dalam pencegahan dan deteksi penipuan. Sistem ini berisi kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan dan memastikan kepatuhan terhadap sanksi dan standar akuntansi yang berlaku untuk ketersediaan informasi keuangan yang andal.

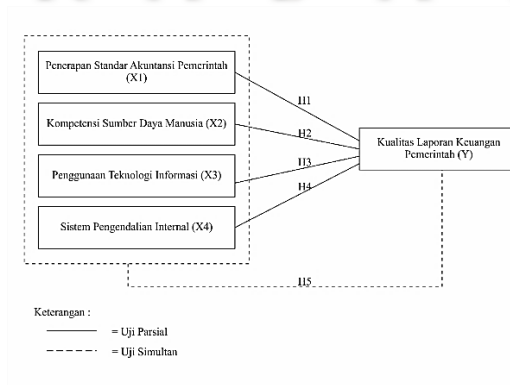
Berdasarkan penjelasan diduga terdapat hubungan positif antara penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, maka hipotesis yang dirumuskan yaitu :

H5 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model yang menjelaskan secara mengenai hubungan antara faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu penting (Sugiyono 2013). Berdasarkan dari kajian teori, tinjauan pustaka yang menjelaskan terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konsep yang sesuai untuk menunjukkan hubungan antar variabel adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif karena menunjukkan hubungan antara lebih dari dua variabel. Peneliti menggunakan alat uji analisis statistik untuk menguji hipotesis yang dikumpulkan dan diuji untuk mendapatkan penjelasan tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di seluruh desa di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dengan jumlah total 14 Desa. Lokasi riset ini dipilih karena berdasarkan survei masih banyak desa yang terlambat dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban sehingga berdampak pada laporan yang dihasilkan.

3.3 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran

3.3.1 Variabel Independen (X)

Variabel independent merupakan variabel yang dapat mempengaruhi terhadap variabel dependen. Variabel independent juga disebut juga dengan pemrediksi atau variabel bebas (Supriadi 2020). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal.

a) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah pedoman yang menguraikan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti saat

membuat, menyajikan, dan menganalisis laporan keuangan untuk entitas pemerintah. Landasan terciptanya sistem akuntansi desa adalah Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dasar akuntansi untuk mendokumentasikan transaksi dan kejadian lain ketika kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dikenal sebagai basis kas (Sunarti et al. 2018).

Indikator yang dipakai dalam penelitian untuk mengukur variabel ini adalah sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu prinsip harga perolehan, prinsip obyektif, prinsip pengungkapan penuh dan konsistensi.

b) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

Kompetensi sumber daya manusia adalah kecakapan yang ada pada seseorang untuk dapat menjalankan instruksi dan amanah yang diberikan dengan memberikan profesionalisme, pengetahuan, keterampilan, etos kerja, dan perencanaan/keterampilan organisasi. Dengan indikator 1. Pemahaman bidang yang relevan, 2. Pengetahuan, 3. Keterampilan, 4. Sikap (Launtu 2021).

c) Penggunaan Teknologi Informasi (X3)

Penggunaan teknologi mengacu pada penerapan teknologi untuk tugas-tugas. Dalam hal ini, proses dimulai dengan pencatatan transaksi dan berlanjut hingga pembuatan laporan keuangan. Informasi keuangan dapat dibuat lebih akurat dan tepat waktu dengan penggunaan teknologi informasi. Penerapan sistem keuangan tingkat desa adalah penekanan utama penggunaan teknologi penelitian (SisKeuDes). Indikator

variabel dalam penggunaan teknologi informasi adalah kecepatan, konsistensi, akurasi dan keandalan (Riyanita and Widiastuti 2020).

d) Sistem Pengendalian Internal (X4)

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh eksekutif (pimpinan, organisasi dan seluruh karyawan) untuk memberikan jaminan yang memadai bagi pencapaian tiga kategori tujuan: keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Sistem pengendalian intern lembaga atau lembaga harus efektif dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah. Indikator sistem pengendalian internal menurut (Hartanti, Askandar, and Sudaryanti 2021) adalah: 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian risiko, 3. Kegiatan pengendalian, 4 Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian internal.

3.3.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel ini biasanya disebut dengan variabel dan merupakan variabel utama yang menjadi daya tarik atau fokus penelitian. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Supriadi 2020). Variabel terikat dari riset ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Kualitas laporan keuangan tahunan pedesaan yang penting terletak pada kenyataan bahwa informasi yang diberikan dalam laporan keuangan dapat dimengerti dan memenuhi keperluan pengguna untuk membuat keputusan tanpa kesalahpahaman dan kesalahan (Launtu 2021).

Indikator yang digunakan sebagai alat ukur dalam riset ini mengenai kualitas laporan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

- a) Relevan. Artinya data dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan para pemakainya. Informasi yang relevan meliputi: memiliki umpan balik, keunggulan prediktif, informasi terkini dan lengkap.
- b) Andal. Artinya data yang terkandung dalam laporan keuangan terlepas dari ketidakakuratan, serta fakta-fakta dapat diungkapkan dan dianalisis secara efektif. Informasi ini meliputi: penyajian sesuai fakta, dapat diverifikasi dan adil.
- c) Dapat dibandingkan. Ini berarti bahwa informasi keuangan paling berguna bila dapat dipadankan dengan informasi keuangan masa lalu atau data keuangan lain yang tersedia untuk umum.
- d) Dapat dipahami. Artinya pengguna informasi keuangan dapat memahami data dalam laporan keuangan (*Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*).

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *skala Likert*. Variabel yang diukur diubah menjadi variabel indikator. Indikator ini digunakan sebagai titik awal untuk membangun objek instrumental seperti pernyataan dan pertanyaan. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dengan lima pilihan jawaban yaitu “sangat tidak setuju (STS) 1”, “tidak setuju (TS) 2”, “netral (N) 3”, “setuju (S) 4” dan “sangat setuju (SS) 5”.

Data yang didapat telah lebih lanjut dalam penelitian ini, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat, sehingga validitas penelitian ini ditentukan dengan instrumen variabel. Oleh karena itu, pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dalam penelitian ini. Semua data yang ada dalam penelitian ini di analisis dan disajikan menggunakan program SPSS 26 (*Statistical Product and Service Solution*).

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan kumpulan umum yang terdiri dari objek/subjek dengan jumlah dan kriteria terpilih yang ditentukan pada penelitian, kemudian ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono 2015). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di Kecamatan Peterongan yaitu sebanyak 14 desa dengan total 169 perangkat desa.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah representasi dari ukuran dan norma populasi (Sugiyono 2013). Teknik pada penelitian meliputi teknik *stratified random sampling* dengan ketentuan desa dengan alokasi dana desa terbesar dan terkecil yakni sebanyak 10 desa. Responden yang akan diteliti adalah perangkat desa yang berperan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 yaitu kepala desa, sekretaris, kepala urusan (kaur) keuangan, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kepala seksi (kasi) pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan sehingga total sampel pada penelitian ini adalah 73 perangkat desa (Sugiyono, 2019).

3.5 Jenis dan Sumber data

Informasi digunakan dalam riset ini data primer. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan selama studi langsung dari sumber atau item. Dua metode yang paling umum untuk mengumpulkan data primer adalah wawancara langsung dan kuesioner (Sugiyono, 2013). Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian lapangan yang berupa hasil jawaban kuesioner yang disebarkan kepada pegawai di Kantor Desa se-Kecamatan Peterongan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini melalui penyebaran kuesioner, yaitu memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden. Penelitian ini menggunakan pertanyaan kuesioner tertutup, dimana responden hanya dapat memilih opsi yang diberikan agar responden dapat menjawab dengan cepat dan memudahkan peneliti dalam menganalisis data (Sugiyono 2013). Metode pengujian yang dilakukan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas.

a) Uji Validitas

Uji validitas diartikan suatu alat ukur yang dilaksanakan guna memperlihatkan tingkatan keakuratan antara data riil yang terjadi pada obyek peneliti. Uji validitas ini memanfaatkan Uji *product moment* untuk memperoleh hasil koefisien hubungan yang terdapat pada bobot pertanyaan angket dengan bobot total masing-masing variabel yang diterima dari responden. Berikut ini terdapat dasar penentuan untuk uji validitas, yaitu:

- a. Apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} , maka data dinyatakan valid.
- b. Apabila sebaliknya, nilai r_{hitung} lebih kecil dari nilai r_{tabel} , maka data dinyatakan tidak valid.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui reliabilitas (tingkat kepercayaan) item soal ketika mengukur variabel-variabel yang diteliti. Suatu alat penelitian dapat memiliki tingkat keandalan yang tinggi jika hasil pengujian alat tersebut menunjukkan hasil yang konsisten. Pada penelitian ini, reliabilitas diukur dengan hasil *Cronbach Alpha*, apabila hasil perhitungan $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,60) maka dapat dikatakan kuisioner reliabel (Supriadi 2020).

3.7 Teknik Analisis

3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Pebriantari and W 2021) analisis ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independent yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan secara parsial atau simultan.

Persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

- α = Konstanta
- X1 = Penerapan standar akuntansi pemerintah
- X2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia
- X3 = Penggunaan Teknologi Informasi
- X4 = Sistem Pengendalian Internal
- β = Koefisien regresi
- e = Standar eror

3.7.2 Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, yaitu statistik yang memberikan penjelasan atas karakteristik sampel penelitian yang telah dikumpulkan dan tidak bermaksud menarik kesimpulan. Tujuan dari statistik deskriptif ini yaitu untuk memberikan penjelasan atas karakteristik sampel penelitian dalam bentuk uraian penjelasan dari tabel perhitungan (Sinambela 2014).

3.8 Kriteria Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan sesuatu tata cara yang digunakan dalam mengenali apakah informasi berasal dari populasi yang terletak pada sebaran wajar ataupun berdistribusi wajar. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk memverifikasi bahwa data empiris yang kita peroleh dari lapangan sesuai dengan distribusi teoritis. Dengan metode *Kolmogorov – Smirnov* dan taraf signifikansi 5% (0,05), dengan kriteria pengujian apabila

nilai variabel $>$ (lebih besar) 0,05 dapat diartikan bahwa hasil data telah normal dan begitu juga sebaliknya (Nuryadi et al. 2017).

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas adalah suatu pengujian model regresi untuk mengetahui terdapat korelasi atau tidak antara variabel independennya. Pada pengujian ini, model regresi yang baik sebenarnya tidak terdapat interelasi antara masing-masing variabel independennya. Ketika multikolinearitas terjadi, variabel yang sangat berkorelasi dengan variabel lain dalam model, daya prediksi tidak dapat diandalkan dan tidak stabil, dampaknya efek koefisien regresi parsial tidak diukur secara akurat. Oleh karena itu, nilai standar *error*-nya besar. Dalam hal ini, nilai interval kepercayaan (*Confidence Interval*) sangat lebar sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol.

Untuk melihat terdapat multikolinearitas atau tidaknya, maka harus melihat nilai tolerance (*tolerance value*) dan *variance inflation factor* (VIF), apabila $VIF \leq 10$ berarti tidak terdapat multikolinearitas dan begitupun sebaliknya.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual antar pengamatan. Terjadinya heteroskedastisitas dapat menyebabkan varians yang besar dalam perkiraan, yang dapat mempengaruhi pengujian hipotesis yang tidak akurat. Semakin besar varians estimasi, semakin besar standar error

estimasi, membuat interval kepercayaan sangat besar. Hasil akhirnya adalah kesimpulan yang ditarik dari persamaan regresi bisa menyesatkan (Rahayu 2021).

Model regresi yang layak tidak mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan mencari ada atau tidak ada pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Model regresi bersifat heteroskedastisitas jika hasil *scatter plot* mengikuti pola tertentu. Model regresi dianggap tidak memiliki heteroskedastisitas jika hasil *scatter plot* tidak menunjukkan pola titik-titik yang jelas memanjang di atas dan di bawah sumbu y angka 0 (Holle, Salle, and Sanggenafa 2019).

3.8.2 Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji T)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah. Ketentuan untuk taraf perolehan (α) yang ditentukan dalam uji ini yaitu 0,05. Sehingga jika nilai signifikansi $t < 0,05$ terbukti bahwa variabel independen dapat mempengaruhi secara parsial variabel dependen dan sebaliknya jika nilai signifikansi $t > 0,05$.

b) Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dirancang untuk menguji efek gabungan atau simultan

dari semua variabel independent yaitu Penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern semuanya akan dinilai sebagai variabel bebas pada variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah. Ketentuan taraf signifikansi (α) yang ditentukan untuk uji ini yaitu 0,05, sehingga jika nilai signifikansi $t < 0,05$ bahwa dipastikan secara simultan variabel independen dapat mempengaruhi terhadap variabel dependen dan sebaliknya (Pebriantari and W 2021).

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar daya variabel independen dalam menguraikan atau mengungkapkan variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah. Kisaran R^2 yang disesuaikan adalah 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasinya kecil atau hampir nol, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor independen memiliki potensi terbatas untuk mengungkapkan variabel dependen. Dan jika nilainya tinggi atau sangat mendekati satu, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki kapasitas untuk menyediakan semua data yang diperlukan untuk menaksir variabel terikat.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kecamatan Peterongan. Kecamatan Peterongan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Terletak di bagian timur Kabupaten Jombang, pusat kecamatannya hanya berjarak 5 km dari pusat kabupaten. Kecamatan Peterongan merupakan kecamatan dengan luas wilayah 29,47 km.

Letak Geografis Kecamatan Peterongan terletak pada Garis Lintang **7° 24" 01" Lintang Selatan 112° 20" 01" Garis Bujur**.

Kecamatan Peterongan memiliki 14 wilayah desa antara lain

1. Desa Kepuhkembeng
2. Keplaksari
3. Peterongan
4. Mancar
5. Morosunggingan
6. Kebontemu
7. Bongkot
8. Tanjunggunung
9. Dukuhklopo
10. Tenganan
11. Sumberagung.

12. Ngrandulor
13. Senden
14. Tugusumberjo

Penelitian ini menggunakan teknik *stratified random sampling* dengan ketentuan pada pembagian dana desa yang terbesar dan terkecil yaitu sebanyak 10 desa, sementara untuk responden yang akan diteliti adalah perangkat desa yang turut dalam pelaksana pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Berdasarkan penentuan sampel yang digunakan, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 73 responden. Berikut data rincian hasil penyebaran kuesioner:

Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang disebarkan	73	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%
3	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%
4	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	73	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2022

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang turut dalam pelaksana pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 dengan jumlah responden sebanyak 73 perangkat desa. Karakteristik responden dikelompokkan menurut:

1. Usia

2. Jenis Kelamin
3. Pendidikan Terakhir
4. Lama Menjabat

Karakteristik responden dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
25-35 Tahun	22	30%
36-45 Tahun	25	34%
>45 Tahun	26	36%
Total	73	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa responden terbesar berusia >45 tahun dengan jumlah sebanyak 26 atau 36% sedangkan responden terkecil berusia 25-35 tahun yaitu dengan jumlah sebanyak 22 responden atau 30%

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	64	88%
Wanita	9	12%
Total	73	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak adalah responden yang berjenis kelamin laki - laki yaitu sebanyak 64 atau 88% sedangkan jumlah paling sedikit adalah perempuan yaitu sebanyak 9 atau 12%. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin laki – laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMP	2	3%
SMA	45	62%
Diploma	1	1%
S1	24	33%
S2	1	1%
Total	73	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah responden terbesar pada tingkat pendidikan terakhir SMA/Sederajat yaitu sebanyak 45 atau 62%, sedangkan jumlah responden terendah pada tingkat pendidikan terakhir D1 dan S2 yaitu sebanyak 1 responden atau 1%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan SMA.

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden berdasarkan Lama Menjabat

Lama Menjabat	Jumlah	Persentase
<1 Tahun	2	3%
1-5 Tahun	22	30%
>5 Tahun	49	67%
Total	73	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang menjabat dalam kurun waktu >5 tahun yaitu sebanyak 49 atau 67%, sedangkan jumlah responden terendah yang menjabat dalam kurun waktu <1 tahun yaitu sebanyak 2 atau 3%.Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian sudah menjabat lebih dari 5 tahun.

4.2.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *product moment* untuk memperoleh hasil koefisien hubungan antara skor pertanyaan yang dimasukkan dalam kuesioner dengan skor total setiap variabel yang didapat dari jawaban responden. uji validitas digunakan untuk menguji semua variabel penelitian yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Setiap item pertanyaan atau pernyataan divaliditas jika nilai koefisien korelasi $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sebaliknya, tidak valid jika $r_{hitung} < r_{tabel}$. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian validitas variabel survei terhadap 73 responden.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Kriteria
X1.1	0.839	0.194	Valid
X1.2	0.808	0.194	Valid
X1.3	0.750	0.194	Valid
X1.4	0.758	0.194	Valid
X1.5	0.750	0.194	Valid
X1.6	0.885	0.194	Valid
X1.7	0.664	0.194	Valid
X1.8	0.715	0.194	Valid

Sumber: data primer, diolah 2022

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Kriteria
X2.1	0.704	0.194	Valid
X2.2	0.752	0.194	Valid
X2.3	0.629	0.194	Valid

X2.4	0.829	0.194	Valid
X2.5	0.771	0.194	Valid
X2.6	0.688	0.194	Valid
X2.7	0.819	0.194	Valid
X2.8	0.772	0.194	Valid
X2.9	0.784	0.194	Valid
X2.10	0.660	0.194	Valid
X2.11	0.731	0.194	Valid

Sumber: data primer, diolah 2022

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Penggunaan Teknologi Informasi

Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Kriteria
X3.1	0.482	0.194	Valid
X3.2	0.769	0.194	Valid
X3.3	0.826	0.194	Valid
X3.4	0.823	0.194	Valid
X3.5	0.827	0.194	Valid
X3.6	0.827	0.194	Valid
X3.7	0.799	0.194	Valid
X3.8	0.830	0.194	Valid
X3.9	0.860	0.194	Valid

Sumber: data primer, diolah 2022

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal

Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Kriteria
X4.1	0.799	0.194	Valid
X4.2	0.759	0.194	Valid
X4.3	0.750	0.194	Valid
X4.4	0.810	0.194	Valid
X4.5	0.811	0.194	Valid
X4.6	0.847	0.194	Valid
X4.7	0.867	0.194	Valid
X4.8	0.880	0.194	Valid
X4.9	0.736	0.194	Valid
X4.10	0.691	0.194	Valid
X4.11	0.657	0.194	Valid
X4.12	0.799	0.194	Valid

Sumber: data primer, diolah 2022

Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Kriteria
Y1.1	0.727	0.194	Valid
Y1.2	0.814	0.194	Valid

Y1.3	0.697	0.194	Valid
Y1.4	0.741	0.194	Valid
Y1.5	0.897	0.194	Valid
Y1.6	0.844	0.194	Valid
Y1.7	0.802	0.194	Valid
Y1.8	0.859	0.194	Valid
Y1.9	0.849	0.194	Valid

Sumber: data primer, diolah 2022

Hal ini membuktikan bahwa semua item proposional untuk setiap variabel dalam survei adalah valid karena memiliki nilai koefisien korelasi rhitung $>$ rtabel, dan dapat mengungkapkan apa yang diukur dalam kuesioner.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan guna mengukur pertanyaan dimulai dari angket yang dijadikan sebagai variabel pertanyaan dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan uji Cronbach's *Alpha*. Suatu kuesioner yang diuji menggunakan *Cronbach's Alpha*, jika nilai *Cronbach's Alpha*-nya $>$ 0,60 maka dapat dikatakan kuesioner tersebut reliabel. Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas data dari penelitian ini.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.898	8	✓
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.915	11	✓
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.922	9	✓

Sistem Pengendalian Internal	0.943	12	✓
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	0.931	9	✓

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 13 di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien *Crombach Alpha* pada masing-masing variabel nilainya $> 0,60$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel penelitian reliable dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.2.3 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atas karakteristik sampel penelitian yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang didalamnya menggambarkan distribusi data seperti, *mean*, *median*, maksimum, minimum, standar deviasi (Taniredja and Mustafidah 2014). Dan kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian penjelasan dari hasil tabel perhitungan yang disajikan.

Tabel 4. 12 Statistik Deskriptif

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	73	13.00	40.00	34.835	4.743
Kompetensi Sumber Daya Manusia	73	23.00	55.00	44.054	6.308

Pemanfaatan Teknologi Informasi	73	13.00	45.00	39.369	5.067
Sistem Pengendalian Internal	73	18.00	60.00	51.643	6.351
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	73	11.00	45.00	37.465	5.647

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden (N) tercatat sebanyak 73 perangkat desa. Dari 73 responden, nilai minimum variabel independen yang diterapkan standar akuntansi pemerintah adalah 13, nilai maksimum 40, rata-rata 34,83, dan standar deviasi 4.743. Kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 55, nilai *mean* sebesar 44.05, dan dengan standar deviasi sebesar 6.308. Penggunaan Teknologi Informasi memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 45, nilai *mean* sebesar 39.36, dan dengan standar deviasi sebesar 5.067. Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesar 60, nilai *mean* sebesar 51.64, dan dengan standar deviasi sebesar 6.351. Sedangkan pada variabel dependen yang berupa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 45, nilai *mean* sebesar 37.46, dan dengan standar deviasi sebesar 5.647.

4.2.4 Uji Regresi Linear Berganda

Teknik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel

independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap variabel dependen yang berupa kualitas laporan keuangan pemerintah.

Tabel 4. 13 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.465	2.872		-1.555	0.125
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.262	0.115	0.220	2.277	0.026
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.183	0.087	0.205	2.109	0.039
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.315	0.132	0.282	2.378	0.020
	Sistem Pengendalian Internal	0.239	0.104	0.269	2.298	0.025

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sumber: Output SPSS 2022

Model regresi dalam penelitian ini dijalankan untuk menguji beberapa hipotesis seperti penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$KLK = -4.465 + 0.262 PSAP + 0.183 KSDM + 0.315 PTI + 0.239 SPI + e$$

Keterangan :

KLK : Proksi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

PSAP : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
 KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia
 PTI : Penggunaan Teknologi Informasi
 SPI : Sistem Pengendalian Internal

Penelitian linear tersebut diinterpretasikan adalah sebagai berikut :

1. Apabila semua variabel bebas nilainya dianggap konstan, maka rata-rata variabel terikat yakni sebesar -4.465.
2. Nilai koefisien penerapan standar akuntansi pemerintah (psap) sebesar 0.262, yang berarti untuk setiap kenaikan satu satuan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dengan asumsi variabel independen lainnya akan bernilai tetap, maka kualitas laporan keuangan pemerintah juga akan turut naik sebesar 0.262.
3. Nilai koefisien kompetensi sumber daya manusia (ksdm) yaitu sebesar 0.183, yang berarti setiap kenaikan satu satuan variabel kompetensi sumber daya manusia dengan asumsi variabel independen lainnya akan bernilai tetap, maka kualitas laporan keuangan pemerintah juga akan turut naik sebesar 0.183.
4. Nilai koefisien penggunaan teknologi informasi (pti) yaitu sebesar 0.315, yang berarti setiap kenaikan satu satuan variabel kompetensi sumber daya manusia dengan asumsi variabel independen lainnya akan bernilai tetap, maka kualitas laporan keuangan pemerintah juga akan turut naik sebesar 0.315.
5. Nilai koefisien sistem pengendalian internal (spi) yaitu sebesar 0.239, yang berarti setiap kenaikan satu satuan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dengan asumsi variabel independen lainnya

akan bernilai tetap, maka kualitas laporan keuangan pemerintah juga akan turut naik sebesar 0.239.

4.2.5 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan guna untuk memverifikasi suatu data yang apabila terdistribusi dengan normal maka berkemungkinan meminimalisir terjadinya bias. Pada penelitian ini untuk mengetahui kenormalan distribusi data sampel memakai *Kolmogorov Smirnov*. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Tabel berikut menunjukkan hasil uji normalitas yang dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* :

Tabel 4. 14 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.74524692
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.084
Test Statistic		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c, d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 2022

Dapat diketahui tabel diatas bahwa data yang terdapat dalam penelitian ini berdistribusi normal, dibuktikan dengan catatan nilai

signifikansi $0,200 > 0,05$.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui terdapat korelasi atau tidak antara variabel independennya. Pada pengujian ini, model regresi yang baik sebenarnya tidak terdapat korelasi antara masing-masing variabel independennya. Untuk mengetahui terdapat multikolinearitas atau tidaknya, maka harus mengetahui nilai *tolerance* (*tolerance value*) dan *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria jika hasil nilai $VIF < 10$, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas atau sebaliknya jika hasil nilai $VIF > 10$, maka terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai VIF	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.327	2.690	Tidak Multikolinearitas
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.370	2.705	Tidak Multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.246	4.057	Tidak Multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal	0.254	3.941	Tidak Multikolinearitas

Sumber: data primer yang diolah, 2022

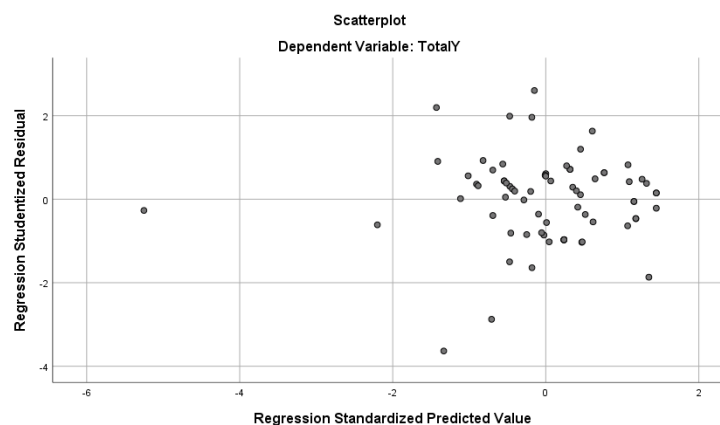
Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki nilai *tolerance* sebesar nilai VIF sebesar $2.690 < 10$, variabel kompetensi sumber daya manusia

memiliki nilai VIF sebesar $2.705 < 10$, variabel penggunaan teknologi informasi memiliki nilai VIF sebesar $4.057 < 10$, variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai VIF sebesar $3.941 < 10$. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang dapat ditemukan antara variabel bebas (independen) dari model regresi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel dalam penelitian ini yang menunjukkan multikolinaritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini merupakan suatu pengujian model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual antar pengamatan. Apabila satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya yang varian dari residualnya itu tetap maka termasuk homoskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini :

Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 2022

Hasil di atas menunjukkan bahwa uji heteroskedastisitas berdasarkan scatterplot memiliki titik-titik yang berdistribusi merata,

yang dapat dilihat tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4.2.6 Uji Hipotesis

a. Uji T

Pengujian uji t ini dilakukan untuk mengetahui perolehan pengaruh secara parsial yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil uji-t untuk penelitian ini :

Tabel 4. 16 Uji T

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-4.465	2.872		-1.555	0.125
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.262	0.115	0.220	2.277	0.026
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.183	0.087	0.205	2.109	0.039
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.315	0.132	0.282	2.378	0.020
	Sistem Pengendalian Internal	0.239	0.104	0.269	2.298	0.025

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sumber: Output SPSS 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai signifikansi untuk pengaruh x_1 (penerapan standar akuntansi pemerintah) terhadap y (kualitas laporan keuangan pemerintah) yaitu sebesar $0.026 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2.277 > t$ tabel

1,666, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan standar penggunaan pemerintah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2. Nilai signifikansi untuk pengaruh x_2 (kompetensi sumber daya manusia) terhadap y (kualitas laporan keuangan pemerintah) yaitu sebesar $0,039 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,109 > t$ tabel 1,666, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

3. Nilai signifikansi untuk pengaruh x_3 (penggunaan teknologi informasi) terhadap y (kualitas laporan keuangan pemerintah) yaitu sebesar $0,020 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,378 > t$ tabel 1,666, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

4. Nilai signifikansi untuk pengaruh x_4 (sistem pengendalian internal) terhadap y (kualitas laporan keuangan pemerintah) yaitu sebesar $0,025 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,298 > t$ tabel 1,666, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

b. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan pengaruh secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintah, kemampuan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan dampak sistem pengendalian intern terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Tabel berikut adalah hasil uji signifikansi F:

Tabel 4. 17 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1753.545	4	438.386	54.938	.000 ^b
	Residual	542.619	68	7.980		
	Total	2296.164	72			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber: data primer, diolah2022.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 54.938 > F tabel 2,50 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan jika terdapat pengaruh secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar daya variabel bebas dalam menguraikan atau mengungkapkan variabel terikat. Hasil

uji ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 18 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 ^a	.764	.750	2.82484
a. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal				
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah				

Sumber: Output SPSS 2022

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, diperoleh nilai dari adjusted R-square pada penelitian ini dengan angka sebesar 0,764 atau 76,4% yang artinya bahwa kemampuan variabel bebas penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, pengawasan internal dalam menjelaskan variasi variabel terikat kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 76,4%. Sedangkan sisanya sebesar 23,6% (100% - 76,4%) dijelaskan oleh variasi faktor lain di luar penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah. Dengan demikian, H_1 menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah diterima yang berarti bahwa semakin diterapkannya standar akuntansi pemerintah maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Peterongan.

Jika standar akuntansi pemerintah diterapkan secara tepat dan sesuai, laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah lebih berkualitas karena disusun sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu faktor pendukungnya adalah objektivitas dan pengungkapan yang lengkap yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan.

Persepsi penerapan standar akuntansi pemerintahan desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah desa Kecamatan Peterongan, disebabkan prinsip akuntansi pada pemerintah desa yang merupakan standar kualitas laporan keuangan untuk menjaga agar informasi yang disajikan wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga penerapannya harus dilakukan secara optimal. Dengan adanya penggunaan standar akuntansi pemerintah pada pemerintahan desa hal ini tentu akan membuat laporan keuangan dengan kualitas informasi yang baik dan sesuai standar akuntansi sehingga memenuhi kualifikasi yang *usefull*, hal sesuai dengan teori akuntansi sektor publik bahwa laporan pemerintah ini dapat menjadi alat penyediaan informasi bagi pemerintah maupun publik secara tepat dan

efisien serta sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa.

Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh karena juga didukung oleh teori *stewardship*. Dalam teori ini, perangkat desa bertanggung jawab dalam bentuk laporan keuangan desa kepada *principal*. Pemerintah desa yang berkewajiban tersebut harus mampu menghasilkan nilai informasi keuangan yang berkualitas. Salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan tersebut adalah semua perangkat desa yang menghasilkan laporan keuangan harus memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip akuntansi. Membuat laporan keuangan yang akurat. Ini dapat diandalkan, akuntabel, dan dapat menjadi informasi yang berguna untuk tingkat pengguna ini.

Senada dengan penelitian penelitian Imam (2020) dan Yuliana, dkk (2020) dan Putri, dkk (2018) juga menemukan hasil yang sama bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

4.3.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, H₂ menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah diterima yang berarti bahwa semakin berkompeten sumber daya manusia yang ada maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan

keuangan pemerintah desa di Kecamatan Peterongan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjaga kualitas laporan keuangan desa. Dengan adanya perangkat desa dengan tingkat kompetensi yang mumpuni maka dapat meminimalisir terjadinya kendala-kendala selama proses penyusunan laporan desa. Pengetahuan yang baik dimiliki oleh perangkat desa maka dapat menghasilkan *output* yang baik pula. Dalam aspek pengetahuan, di Kecamatan Peterongan tingkat pendidikan aparat desa rata-rata lulusan SLTA/ sederajat namun kompetensi dalam pengelola dan penyusunan laporan keuangan sudah baik. Aparat desa sudah memahami tugas pokok dan uraian tugas yang menjadi tanggung jawabnya, aparat desa juga sudah mengetahui bagaimana siklus akuntansi dalam pemerintahan desa serta memahami peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, setiap perangkat desa juga memiliki keterampilan dan sikap yang baik dan mengerti apa saja peran, fungsi, tata cara, dan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.

Menurut teori *stewardship*, perangkat desa (*steward*) termotivasi untuk bertindak demi kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, peran kompetensi manusia dalam penyusunan laporan keuangan desa sangat dibutuhkan. Pemerintah desa didorong untuk meningkatkan kapasitas aparturnya, dalam hal ini termasuk sumber daya untuk pengelolaan keuangan dan pelaporan

keuangan.

Hasil riset dari Lisda, dkk (2018), Launtu (2021), Putri, dkk (2018), Rifandi (2019) dan Zubaidi, dkk (2019) juga menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

4.3.3 Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Dengan demikian, H₃ menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah diterima yang berarti bahwa semakin maksimal penggunaan teknologi informasi maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Peterongan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi turut mendukung tercapainya kualitas laporan keuangan. Dapat dikatakan penggunaan teknologi informasi dikalangan pemerintah desa wilayah Kecamatan Peterongan cukup baik, hal ini dikarenakan setiap desa telah menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan baik didukung dengan adanya akses internet dan tersedianya perangkat komputer untuk mengelola dan menyusun laporan keuangan desa, walaupun pada beberapa waktu terjadi kendala seperti

jaringan *wifi* yang bermasalah, sistem dari pusat yang *error* dan perangkat komputer di balai desa yang terkendala namun tidak menjadi masalah serius dalam proses penyusunan laporan keuangan karena dari pihak aparat desa sendiri sudah memiliki perangkat komputer yang dapat mendukung penyelesaian tugas penyusunan laporan keuangan desa.

SISKEUDES sendiri dibuat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa yang mana laporan keuangan tersebut dipantau langsung oleh pemerintah, sehingga kesalahan atau kecurangan yang dibuat oleh desa dapat diketahui oleh pemerintah pusat. SISKEUDES juga dibuat selain untuk memudahkan para pegawai desa dalam membuat laporan keuangan, juga untuk meminimalisir kesalahan angka atau penyajian laporan keuangan, baik itu laporan harian, bulanan atau tahunan. SISKEUDES juga memiliki kecepatan menginput data, *login* dan *logout* serta pencarian data yang cukup cepat sehingga operator SISKEUDES tidak perlu menunggu lama ketika mengentri data atau sedang terburu-buru ketika membutuhkan data.

Teori *Stewarship* menjelaskan hubungan yang kuat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Keberhasilan dalam organisasi dapat di capai dengan memaksimalkan kepentingan *principals* dan manajemen. Teori ini dapat menjelaskan bahwa pemerintah sebagai administrator akan melakukan yang terbaik untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi bagi masyarakat sebagai *principals*. Teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mempermudah pengerjaan dan meningkatkan kinerja. Pemerintah desa

juga harus mengungkapkan data akuntansi dan informasi lainnya secara jelas dan rinci, sesuai dengan penggunaan sistem keuangan desa dalam pemrosesan laporan keuangan desa.

Hasil studi yang telah dilakukan oleh Rifandi (2019), Zubaidi, dkk (2019), Yuliana, dkk (2020) dan Mene (2018) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

4.3.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap nilai laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, H_4 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah diterima yang berarti bahwa semakin diterapkannya pengendalian internal maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Peterongan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan intern suatu desa di Kecamatan Peterongan maka semakin besar peluang yang dimiliki untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Ini karena pengawasan intern merupakan suatu perencanaan struktur organisasi, metode, dan alat koordinasi yang digunakan oleh organisasi untuk tujuan menjaga keamanan aset organisasi, memverifikasi keakuratan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan membantu

manajemen pemerintahan, menjadikan kebijakan yang telah ditetapkan untuk dipatuhi.

Untuk lingkungan pengendalian dibuktikan dengan setiap desa memiliki struktur organisasi yang jelas, ditetapkannya aturan perilaku dan etika pegawai oleh pimpinan, sehingga setiap pegawai mampu menyesuaikan dengan siapa ia berhadapan. Jika lingkungan pengendalian desa sudah berjalan dengan baik, maka desa mudah untuk melaksanakan otonomi desa. Dalam penilaian risiko, setiap aparat desa memiliki standar kemampuan untuk setiap kewajiban yang di embannya serta memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Semua desa menganggap bahwa kepala desa sudah memberikan keteladanan dalam melakukan penilaian risiko jika terjadi pelanggaran sistem akuntansi, dan setiap kepala desa memiliki upaya untuk mengurangi risiko pelanggaran sistem dan prosedur akuntansi jika itu terjadi. Setiap aset desa telah ditentukan dengan baik dan telah memahami tujuan pengendalian, peralatan, dan perlengkapan diamankan secara fisik. dan terlindung dari kerusakan, namun untuk peralatan dan perlengkapan yang dimiliki belum diberikan penomoran yang sesuai.

Hal ini membuktikan bahwa desa-desa di Kecamatan Peterongan telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan kedudukan yang menjadi tanggung jawabnya dalam pekerjaannya dan mentaati setiap prosedur yang ditentukan dari pemerintah. Oleh karena itu, semakin patuh pimpinan dan aparat desa dalam melaksanakan prosedur

yang dibuat oleh pemerintah, semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan, karena terhindar dari kecurangan dan kesalahan dalam menginput data.

Berdasarkan teori *Stewardship*, pengawasan internal sebagai pengendali aparat pemerintah untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan rencana dan program yang sudah di rancang sebelumnya, sehingga efektivitas, efisiensi program dan keandalan data dapat terpenuhi dan tujuan dari pemerintah desa dapat tercapai. Dengan pengendalian internal ini, kesalahan dalam pemrosesan informasi keuangan pemerintahan dapat dikurangi sehingga laporan yang dihasilkan dapat memcerminkan sesuai kenyataan yang ada. Memiliki sistem pengendalian internal menghindari korupsi dan penipuan, sehingga membuat kegiatan pemerintah lebih efisien. Aparat desa selaku *steward* mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat desa selaku *principals* dan melayani segala kepentingan semaksimal mungkin. Sistem pengendalian internal pemerintah menjadi penting karena dengan memiliki sistem pengendalian yang baik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa, akuntabilitas dan transparansi, serta kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa.

Hasil riset dari Lisda, dkk, Lisda, dkk (2018), Tanjung dan Sonia (2021), Faisol (2016) dan Mene, dkk (2018) mendapatkan hasil bahwa

sistem pengawasan intern dapat memengaruhi nilai informasi dari laporan keuangan.

4.3.5 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi, dan pengawasan intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, H₄ menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi, dan pengawasan intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah diterima. Hal ini menyatakan bahwa semakin diterapkannya standar akuntansi pemerintah, tingginya kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi yang maksimal, dan pengawasan internal yang dilakukan oleh perangkat desa, maka dapat mempengaruhi nilai informasi keuangan pemerintah sehingga akan berdampak pada naiknya kualitas laporan keuangan pemerintah.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan hasil penelitian pada Kecamatan Peterongan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah desa di Kecamatan Peterongan. Hipotesis diterima, hal ini membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Peterongan akan meningkat apabila perangkat pemerintahan desa menerapkan standar akuntansi pemerintah.
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Peterongan. Hipotesis diterima, hal ini membuktikan semakin bertambahnya pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia pada pemerintah desa, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah.
3. Penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Peterongan. Hipotesis diterima, hal ini membuktikan bahwa seluruh pemerintah desa telah memanfaatkan teknologi informasi yang meliputi aplikasi Sistem Keuangan Desa secara maksimal dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.
4. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Peterongan. Hipotesis diterima,

hal ini membuktikan dengan menciptakan lingkungan pengendalian dan pengawasan internal yang sesuai akan meningkatkan kualitas nilai laporan keuangan pemerintah.

5. Penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Peterongan.

5.2 Saran

Dari hasil analisa dan kesimpulan penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. Bagi pemerintah desa diharapkan untuk membenahi perangkat teknologi yang tersedia sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, akurasi perhitungan, dan laporan dan hasil lainnya dalam pengelolaan keuangan agar lebih tepat waktu, serta untuk pengendalian internal pada indikator kegiatan pengendalian untuk aset yang dimiliki seharusnya sudah diberikan penomoran yang sesuai
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan survei terhadap pemerintah desa tidak hanya di Kecamatan Peterongan, tetapi bisa diperluas untuk Kabupaten Jombang.
3. Bagi penelitian selanjutnya juga untuk menambahkan wawancara ke dalam teknik survei sehingga meningkatkan kepedulian dan keseriusan responden dalam menanggapi semua pertanyaan yang diajukan, mengurangi subjektivitas responden, dan memastikan konsistensi hasil jawaban

responden saat menggunakan metode wawancara. Selain itu, menambahkan variabel independen lain yang dimasukkan, dengan harapan lebih banyak faktor tersebut akan berdampak pada variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Adah, Shohabatussa ', and Muhammad Nasrullah. 2021. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan." *Jurnal Akuntansi Publik* 1(1). <https://ejournal.poltektegal.ac.id/jpa>.
- Ayu, Putu Cita, and Ni Putu Ayu Kusumawati. 2020. "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANJAR (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANJAR)." *Widya Akuntansi dan Keuangan* 2(1): 1–14.
- Chantika, Jelita. "Korupsi Dana Desa : 'Lawan Tersembunyi' Pencapaian Strategi Presiden Dalam Membangun Desa | Klik Warta." <https://www.klikwarta.com/korupsi-dana-desa-lawan-tersembunyi-pencapaian-strategi-presiden-dalam-membangun-desa> (October 9, 2021).
- Gagali, Yakub Rozani, and Cris Kuntadi. 2019. "PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, KOMPETENSI DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA Alumni Pascasarjana Perbanas Institute." *Jurnal Riset Perbankan Manajemen dan Akuntansi Volume* 3(2).
- Hartanti, Dina, Noor Askandar, and Dwiyan Sudaryanti. 2021. "PENGARUH PENERAPAN GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN INTERNAL CONTROL SYSTEM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH." *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 10(8).
- Holle, Vania Annisa, Agustinus Salle, and Mariolin Sanggenafa. 2019. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* 14(1).
- Jati, Budhi Purwantoro. 2019. "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH." *Wahana* 21(1): 1–14.
- Jatmiko, Bambang, Nano Prawoto, Rini Juni Astuti, and Desy Wulandari. 2019. "The Effect of Human Resources, Internal Control System, and Implementation Effectiveness of Village Financial Systems on Village Financial Statements Quality (Survey on Entire Village in Bantul District)."

Management and Economics Journal (MEC-J) 3(1): 23.

Juhirman, Rintok. "Laporan Keuangan Desa Dari Basis Kas Menuju Basis Akrua." <http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3093-laporan-keuangan-des-dari-basis-kas-menuju-basis-akrua.html> (October 9, 2021).

Kiranayanti, Ida, and Ni Made Erawati. 2016. "PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMAHAMAN BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(2).

Launtu, Ansir. 2021. "PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA." *AkMen* 18(1): 14–27.

M, Anas, Forijati, and Mochammad Muchson. 2021. "PENGARUH GOOD PUBLIC GOVERNANCE (GPG) TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KEDIRI." *JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI* 6(1).

Marnis, and Priyono. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 1st ed. ed. Teddy Chandra. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Melinda, Ni Kadek Gino, and Putu Cita Ayu. 2021. "PENGARUH KOMPOTENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA SE- KECAMATAN GIANYAR (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan G." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 2(2).

Mene, Restika Eklesia, Herman Karamoy, and Jessy D.L. Warongan. 2018. "PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3): 133–43.

Nuryadi, Tutut Dewi Astuti, Endang Sri Utami, and M Budiantara. 2017. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: SIBUKU MEDIA.

Pangestu, Marisa Eka, Khusnatul Wafirotn, and Arif Hartono. 2019. "PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PONOROGO." *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3(2): 108–19.

Pebriantari, Ni Kadek, and Ria Dwi Andayani W. 2021. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada LPD SeKecamatan Gianyar)." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 2(2).

Peraturan Pemerintah No. 60. 2008. Indonesia.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. 2010. Indonesia.
<http://www.dikti.go.id/files/atur/PP17-2010Lengkap.pdf>.

Pradono, Febrian Cahyo, and Basukianto. 2015. "KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 22(2): 188–200.

Pravasanti, Yuwita Arriesa, and Suhesti Ningsih. 2019. "Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo)." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 2(2): 199.

Putri, Annie Mustika, Linda Hetri Suriyanti, and Diane Binangkit. 2018. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika* 8(2).

Rahayu, Anita. 2021. "Heteroskedastisitas Dan Regresi Gamma." *Binus University*.
<https://binus.ac.id/malang/2021/11/heteroskedastisitas-dan-regresi-gamma/>
(July 3, 2022).

Renyowijoyo, Muindro. 2010. *2 Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Nonlaba*. 2nd ed. Jakarta: Mitra Wacana Media.

———. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Nonlaba*. 3rd ed. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rifandi, Zaizar Wiet. 2019. "PENGARUH IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)." *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 04(01).

Riyanita, Alvina Ghina, and Harjanti Widiastuti. 2020. "Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kabupaten Sleman)." *Jurnal Akuntansi Bisnis* 18(1): 115–28.

Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sueng, Yuliana, Sulaiman, and Suryaningsi. 2020. "PROGRAM STUDI AKUNTANSI." *Jurnal Akuntansi* 7(3).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 19th ed. Bandung: ALFABETA.
- . 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, Nyoman et al. 2018. "Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 8(1).
- Supriadi, Imam. 2020. *Metode Riset Akuntansi*. 1st ed. ed. Amira Dzatina Nabila. Sleman: Deepublish.
- Surya Prayogo, Imam, and Erna Setiany. 2020. "The Influence of Government Transparency, Implementation of the Government Accounting Standards and Internal Control System on Quality of Financial Statement (A Survey Conducted in the Village Administration Bandung Regency, Indonesia)." *Scholars Bulletin* 6(7): 174–81.
- Tampubolon, Fitri Maria, and Ahmad Basid. 2019. "KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta)." *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* III(1): 55–65.
- Taniredja, Tukiran, and Hidayati Mustafidah. 2014. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz, and Wina Sonia. 2021. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi." *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)* 4(1): 24. <http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/jemma/article/view/575>.